

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018.09.320091
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



CALK SAIBA

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No.38 Tanjungpinang
Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Dan berpedoman pada PMK Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan PMK Nomor; 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Mizu Istianto, MP
NIP. 196612301993031003

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Aset Lainnya

C.3.1 Aset Lain-lain

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.4.2 Uang Muka dari KPPN
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Mizu Istianto, MP
NIP.196612301993031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PMK Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.500.000,00 atau mencapai 40.67% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp25.820.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA. 2018 adalah sebesar Rp5.673.625.105,00 atau mencapai 90.50% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.269.069.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.924.177.581,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp22.128.300,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.897.001.781,00; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp1.061.600,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.047.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.140.100,00 dan Rp13.923.115.981,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.500.000,00, sedangkan jumlah beban Operasional adalah sebesar Rp5.784.141.032,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.773.641.032,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp321.350.000,00. Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp503.540.000,00, sedangkan jumlah beban senilai Rp301.340.000,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Non Operasional senilai Rp-119.150.000,00. Dengan demikian secara entitas LO mengalami Defisit sebesar Rp-5.892.791.032,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp14.150.304.608,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.892.791.032,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp398.800,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.663.125.105,00 dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas sebesar Rp-227.188.627,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp13.921.037.481,00. Untuk tahun anggaran 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki ekuitas awal sebesar Rp7.444.142.535 yang memiliki kenaikan ekuitas senilai Rp6.706.162.073,00 sehingga nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp14.150.304.608.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LOKA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	25.820.000,00	10.500.000,00	40,67	9.952.600,00
Jumlah Pendapatan		25.820.000,00	10.500.000,00	40,67	9.952.600,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	1.623.879.000,00	1.613.077.482,00	99	1.310.780.230,00
Belanja Barang	B.3	4.145.190.000,00	3.565.845.873,00	86,02	3.423.045.474,00
Belanja Modal	B.4	500.000.000,00	494.701.750,00	98,94	4.287.850.310,00
Jumlah Belanja		6.269.069.000,00	5.673.625.105,00	90,50	9.021.676.014,00

II. NERACA

LOKA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN 31 Desember 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	-
Persediaan	C.1.2	22.128.300,00	166.079.000,00
Jumlah Aset Lancar		22.128.300,00	166.079.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	4.568.076.000,00	4.568.076.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.960.223.243,00	2.465.521.493,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	8.556.368.860,00	8.556.368.860,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	47.232.825,00	47.232.825,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	22.280.000,00	22.280.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	-1.982.279.466,00	-1.577.148.489,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-270.776.002,00	-96.628.094,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	-4.123.679,00	-2.909.337,00
Jumlah Aset Tetap		13.897.001.781,00	13.982.793.258,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2	11.260.000,00	11.260.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-12.327.500,00	-9.391.250,00
Jumlah Aset Lainnya		5.047.500,00	7.983.750,00
Jumlah Aset		13.924.177.581,00	14.156.856.008,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	3140100,00	6.551.400,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.140.100,00	6.551.400,00
Jumlah Kewajiban		3.140.100,00	6.551.400,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	13.921.037.481,00	14.150.304.608,00
Jumlah Ekuitas		13.921.037.481,00	14.150.304.608,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		13.924.177.581,00	14.156.856.008,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LOKA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	10.500.000,00	452.600,00
JUMLAH PENDAPATAN		10.500.000,00	452.600,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.608.998.082,00	1.315.381.830,00
Beban Persediaan	D.3	954.384.550,00	343.953.960,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.430.035.642,00	1.756.472.298,00
Beban Pemeliharaan	D.5	180.415.008,00	217.323.693,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.026.479.473,00	1.083.501.323,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	583.828.277,00	557.814.940,00
JUMLAH BEBAN		5.784.141.032,00	5.274.448.044,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.773.641.032,00	-5.273.995.444,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	9.500.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-321.350.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	503.540.000,00	139.160.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	-301.340.000,00	-39.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-119.150.000,00	148.621.000,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.892.791.032,00	-5.125.374.444,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	Catatan	#####	#####
EKUITAS AWAL	E.1	14.150.304.608,00	7.444.142.535,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-5.892.791.032,00	-5.125.374.444,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	398.800,00	2.810.861.853,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.4.3	0,00	2.810.861.853,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	398.800,00	0,00
Lain-lain	E.4.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR EKUITAS	E.5	5.663.125.105,00	9.020.674.664,00
KENAIKAN/PENURUNAN AKUITAS	E.6	-227.188.627,00	6.706.162.073,00
EKUITAS AKHIR		13.921.037.481,00	14.150.304.608,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan dan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan – Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatannya. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurangan ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Perubahan Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan PMK No. 181/PMK.06/2016 atas perubahan PMK No. 120/PMK.06/2007

tentang Penatausahaan BMN. Sesuai dengan pasal 40 ayat 4 nilai perolehan: 1).Peralatan dan Mesin (termasuk Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin) sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,-; 2).Gedung dan Bangunan (termasuk Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan) sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,-. Dan pengecualian Kapitalisasi pada pasal 40 ayat 5 pada : 1). Tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan (keseluruhan terkapitalisasi/intrakomptabel); 2). Aset tetap lainnya (hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi)

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester II TA. 2018, Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 7 (tujuh) kali. Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk mendukung kegiatan ternak ayam sebelumnya, pengoptimalan anggaran pada pos-pos akun yang tidak optimal dan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan strategis dan untuk menutupi belanja pegawai yang minus. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja barang sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA awal dengan revisi terakhir (ke-7).

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	25.820.000,00	25.820.000,00
Jumlah Pendapatan	25.820.000,00	25.820.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.351.286.000,00	1.617.279.000,00
Belanja Lembur	10.660.000,00	6.600.000,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	7.287.000,00	0,00
Belanja Barang Operasional	484.128.000,00	486.128.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.736.612.000,00	923.376.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.040.811.000,00	1.128.707.000,00
Belanja Jasa	373.076.000,00	297.479.000,00
Belanja Pemeliharaan	209.300.000,00	188.300.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	760.500.000,00	1.121.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah Belanja	7.473.660.000,00	6.269.069.000,00

B.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.500.000,00 atau mencapai 40.67% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp25.820000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA.2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	25.820.000,00	10.500.000,00	40,67
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.820.000,00	10.500.000,00	40,67

Realisasi Pendapatan Semester II TA. 2018 mengalami kenaikan sebesar 5.50% dibandingkan 31 Desember TA. 2017. Kenaikan pendapatan karena pada bulan Juli 2018 terdapat PNBPN penjualan hasil pertanian sebesar Rp10.080.000,- dari kegiatan UPBS tahun anggaran 2017 dan pendapatan sewa rumah dinas di Jl. Arif Rahman Rt.01/02 Tanjungpinang selama 12 bulan. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	9.500.000,00	-100
Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	10.080.000,00	0,00	0,00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	420.000,00	452.600,00	-7,20
Pendapatan luran dan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.500.000,00	9.952.600,00	5,50

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II TA. 2018 adalah sebesar Rp5.673.625.105,00 atau 90.50% dari anggaran belanja sebesar Rp6.269.069.000,00. Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp545.501,00 yang terdiri dari pengembalian belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp545.000,00 dan pengembalian pembulatan gaji PNS Rp501,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA. 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018.

Uraian	2018			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		1.623.879.000,00	1.613.622.983,00	99,37
Belanja Barang		4.145.190.000,00	3.565.845.873,00	86,02
Belanja Modal		500.000.000,00	494.701.750,00	98,94
Total Belanja Kotor		6.269.069.000,00	5.674.170.606,00	90,51
Pengembalian Belanja		0,00	-545.501,00	0,00
Total Belanja		6.269.069.000,00	5.673.625.105,00	90,50

Realisasi Belanja Semester II TA. 2018 mengalami penurunan sebesar -38.44% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

- Perbedaan nilai Pagu Anggaran antara DIPA tahun 2017 dan 2018.
- Pagu belanja modal di tahun 2018 lebih sedikit dibanding tahun 2017 atau hanya berkisar 11,25% dari pagu belanja modal tahun 2017.

Namun realisasi belanja pegawai dan belanja barang tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	1.613.077.482,00	1.318.618.000,00	22,33
Belanja Barang	3.565.845.873,00	3.499.150.000,00	1,91
Belanja Modal	494.701.750,00	4.397.990.000,00	-88,75
Total Belanja	5.673.625.105,00	9.215.758.000,00	-38,44

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.613.077.482,00 dan Rp1.310.780.230,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA. 2018 mengalami kenaikan sebesar 23,06% dari realisasi 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Bertambahnya jumlah pegawai sebanyak 4 orang CPNS dan berkurang 1 pegawai karena pensiun di akhir bulan April.
- Terdapat pegawai yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, dan kenaikan pangkat fungsional maupun pangkat kepegawaian.
- Pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan umum pegawai dan pembulatan gaji PNS lebih kecil dari tahun 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.607.126.983,00	1.312.075.385,00	22,49
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.607.126.983,00	1.312.075.385,00	22,49
Pengembalian Belanja Pegawai	-545.000,00	-1.295.155,00	-57,92
Jumlah Belanja	1.606.581.983,00	1.310.780.230,00	22,57

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.565.845.873,00 dan Rp3.423.045.474,00. Realisasi belanja barang Semester II TA. 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,17% dari 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya jumlah belanja untuk keperluan kegiatan penelitian di lapangan, jumlah penerima honor operasional kantor, kenaikan gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
2. Untuk belanja barang persediaan mengalami peningkatan sebesar 152,58%, hal ini dikarenakan bahan untuk kegiatan penelitian yang sebelumnya di Belanja Barang Non Operasional masuk dalam Belanja Persediaan dan penilaian kembali nilai perbenihan anggaran 2017 yang semula Rp139.160.000,- menjadi Rp321.350.000,-
3. Belanja pemeliharaan mengalami penurunan realisasi pada tahun 2018 disebabkan tidak banyak aset yang dilakukan pemeliharaan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 30 September 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	482.788.827,00	464.613.630,00	3,91
Belanja Barang Non Operasional	731.907.409,00	1.104.484.860,00	-33,73
Belanja Barang Persediaan	930.285.850,00	368.312.960,00	152,58
Belanja Jasa	214.671.306,00	189.799.008,00	13,10
Belanja Pemeliharaan	179.713.008,00	212.333.693,00	-15,36
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.026.479.473,00	1.083.501.323,00	-5,26
Jumlah Belanja Kotor	3.565.845.873,00	3.423.045.474,00	4,17
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.565.845.873,00	3.423.045.474,00	4,17

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp494.701.750,00 dan Rp4.287.850.310,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada Semester II TA. 2018 mengalami penurunan sebesar 88,46 % dibandingkan 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu belanja modal pada tahun 2018 lebih kecil dari tahun 2017.
2. Masing-masing pada tahun 2017 dan 2018 terdapat belanja peralatan dan mesin. Belanja peralatan dan mesin tahun 2018 lebih besar 398,65% dari belanja tahun 2017.
3. Tidak ada belanja modal gedung bangunan, jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2017 terdapat belanja gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.701.750,00	99.207.950,00	398,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	4.188.642.360,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	494.701.750,00	4.287.850.310,00	-88,46
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	494.701.750,00	4.287.850.310,00	-88,46

B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp494.701.750,00 dan Rp99.207.950,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 398,65% dibandingkan per 30 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat belanja peralatan dan mesin pada tahun 2018 berupa pengadaan Soundsystem dan Wireless TOA, Pengadaan Meubeuler Kantor, Pengadaan Peralatan kantor, perangkat data/komunikasi dan peralatan penelitian dan Pengadaan Bunker atau penampung air. Sedangkan pada tahun 2017 berupa Kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga, mesin bajak/cultivator dan printer.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.701.750,00	99.207.950,00	398,65
Jumlah Belanja Kotor	494.701.750,00	99.207.950,00	398,65
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	494.701.750,00	99.207.950,00	398,65

B.5.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.188.642.360,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA. 2018 mengalami penurunan sebesar -100% dibandingkan 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak ada pagu belanja modal gedung dan bangunan untuk tahun anggaran 2018, pada tahun 2017 terdapat renovasi gedung kantor, pembangunan screen house, pembangunan pagar belakang dan pos jaga.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	4.188.642.360,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	4.188.642.360,00	-100,00
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0,00	4.188.642.360,00	-100,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.128.300,00 dan Rp166.079.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 18	31 Desember 17
Barang Konsumsi	2.118.300,00	17.185.000,00
Bahan Baku	20.010.000,00	147.014.000,00
Persediaan Lainnya	0,00	1.880.000,00
Jumlah	22.128.300,00	166.079.000,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.568.076.000,00 dan Rp4.568.076.000,00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	300,00m ²	Ir. Sutami Rt.01/02, Bukit Bestari	264.000.000,00
2.	250,00m ²	Jl. Arif Rahman Rt.01/02, Bintan Selatan	202.600.000,00
3.	3.718,00m ²	Pelabuhan Sungai Jang Rt.01/01, Tanjungpinang Timur	3.836.976.000,00
4.	200,00m ²	Ir. Sutami Rt.01/01, Tanjungpinang Timur	264.500.000,00
Jumlah			4.568.076.000,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp2.960.223.243,00 dan Rp2.465.521.493,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.465.521.493,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	494.701.750,00
Saldo per 30 September 2018	2.960.223.243,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2018	-1.982.279.466,00
Nilai Buku per 30 September 2018	977.943.777,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Belanja modal peralatan dan mesin berupa Soundsystem senilai Rp.54.480.000,00
2. Belanja modal Pengadaan Meubeuler Kantor senilai RP188.936.750,00
3. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor, Pengelola Data dan Komunikasi serta Peralatan Penelitian senilai Rp193.500.000,00 dan,
4. Belanja modal Pengadaan Bunker atau penampung air dan jasa konsultan perencana dan pengawas Bunker atau penampung air senilai Rp57.785.000,00

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.556.368.860,00 dan Rp8.556.368.860,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	8.556.368.860,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	39.880.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	(39.880.000)
Saldo per 31 Desember 2018	8.556.368.860,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(270.776.002)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	8.285.592.858,00

Mutasi tambah / kurang diperoleh dari koreksi pencatatan nilai pagar permanen.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp47.232.825,00 dan Rp47.232.825,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	47.232.825,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Saldo per 31 Desember 2018	47.232.825,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(4.123.679,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	43.109.146,00

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.280.000,00 dan Rp22.280.000,00. Nilai Aset Tetap Lainnya tersebut berupa:

- Buku Lainnya senilai Rp5.280.000,00.
- Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya senilai Rp17.000.000,00.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-2.257.179.147,00 dan Rp-1.676.685.920,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	2.960.223.243,00	-1.982.279.466,00	977.943.777,00
2.	Gedung dan Bangunan	8.556.368.860,00	-270.776.002,00	8.285.592.858,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.232.825,00	-4.123.679,00	43.109.146,00
4.	Aset Tetap Lainnya	22.280.000,00	0	22.280.000,00
	Akumulasi Penyusutan	11.586.104.928,00	-2.257.179.147,00	9.328.925.781,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud ini merupakan Software.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp,11.260.000,00 dan Rp11.260.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	11.260.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2018	11.260.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-7.741.250,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3.518.750,00

Tidak terdapat mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-12.327.500,00 dan Rp-9.391.250,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset tak Berwujud	6.115.000,00	-4.586.250,00	1.528.750,00
2.	Aset Lain-lain	11.260.000,00	-7.741.250,00	3.518.750,00
Akumulasi Penyusutan		17.375.000,00	-12.327.500,00	5.047.500,00

Aset tak berwujud merupakan software Reporting Tools yang belum dilakukan penghapusan sampai pada pelaporan tahun anggaran 2018 dan direncanakan akan melakukan pengajuan penghapusan ke KPKNL di awal tahun 2019. Dan aset lain-lain merupakan aset tetap lainnya yang tidak digunakan dalam operasional kantor yang terdiri dari stabilizer. Aset ini belum dilakukan usulan penghapusan pada pelaporan 2018 dan akan diusulkan penghapusan pada awal tahun 2019.

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.140.100,00 dan Rp6.551.400,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.062.200,00	5.141.600,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.077.900,00	1.409.800,00
Jumlah	3.140.100,00	6.551.400,00

Utang pada pihak ketiga terdiri dari:

- Pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat sebesar Rp521.600,00.
- Pembayaran kekurangan tunjangan struktural sebesar Rp540.000,00.
- Pembayaran belanja langganan air bulan Desember 2018 sebesar Rp.2.077.900

C.4.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.923.115.981,00 dan Rp14.150.304.608,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.500.000,00 dan Rp9.952.600,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	9.500.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	10.080.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	420.000,00	452.600,00	-7,20
Jumlah	10.500.000,00	9.952.600,00	5,50

Peningkatan pendapatan per 31 Desember 2018 sebanyak 5,50% diperoleh dari adanya penjualan Benih Tanaman Padi kegiatan UPBS TA. 2017 yang perolehannya di tahun 2018 dan sewa rumah dinas di Jl. Arif Rahman Rt.01/02 Tanjungpinang selama 12 bulan.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.608.998.082,00 dan Rp1.315.381.830,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	1.063.277.440,00	911.379.600,00	16,67
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.010,00	15.467,00	29,37
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56.649.786,00	40.253.610,00	40,73
Beban Tunj. Anak PNS	22.116.036,00	16.060.136,00	37,71

Uraian	31-Des-18	31-Des-17	% Naik / Turun
Beban Tunj. Beras PNS	55.056.360,00	43.741.680,00	25,87
Beban Tunj. Fungsional PNS	207.740.000,00	148.850.000,00	39,56
Beban Tunj. PPh PNS	7.545.450,00	5.052.337,00	49,35
Beban Tunj. Struktural PNS	540.000,00	3.600.000,00	-85,00
Beban Tunjangan Umum PNS	41.410.000,00	30.265.000,00	36,82
Beban Uang Lembur	6496000	0	0,00
Beban Uang Makan PNS	148.147.000,00	116.164.000,00	27,53
Jumlah	608.998.082,00	1.315.381.830,00	-53,70

Perbedaan Beban Pegawai yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disebabkan oleh:

- Terdapat pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional sebanyak 2 orang, dan Kenaikan Pangkat sebanyak 5 orang.
- Penambahan pegawai baru 4 (empat) orang pada semester 1 tahun 2018.
- Terdapat satu pegawai pensiun di bulan April 2018.
- Terdapat KGB sebanyak 11 pegawai.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp954.384.550,00 dan Rp343.953.960,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	742.574.300,00	193.303.500,00	284,15
Beban Persediaan konsumsi	130.453.250,00	121.609.260,00	7,27
Beban persediaan lainnya	81.357.000,00	29.041.200,00	180,14
Jumlah	954.384.550,00	343.953.960,00	177,47

Tingginya beban persediaan di tahun 2018 ini dikarenakan adanya produksi bibit taman pertanian kegiatan perbenihan dari tahun anggaran 2017 yang belum tersalurkan seluruhnya dan belanja bahan penunjang kegiatan dimasukkan dalam

akun persediaan. Pada bulan Oktober tahun 2018 baru dua jenis bibit yang terdistribusikan dan masih tersisa satu bibit lagi yaitu bibit tanaman karet yang rencana seluruhnya di bulan Maret-April 2019. Lambatnya distribusi bibit dikarenakan proses penempelan batang bawah baru selesai di bulan Desember 2018.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.427.957.742,00 dan Rp1.756.472.298,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	126.989.250,00	825.984.860,00	-84,63
Beban Barang Non Operasional Lainnya	533.568.159,00	220.500.000,00	141,98
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	112.080.000,00	112.080.000,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	71.350.000,00	58.000.000,00	23,02
Beban Jasa Profesi	66.200.000,00	68.700.000,00	-3,64
Beban Keperluan Perkantoran	367.708.827,00	349.179.630,00	5,31
Beban Langganan Air	21.338.100,00	17.274.200,00	23,53
Beban Langganan Listrik	76.882.726,00	65.487.836,00	17,40
Beban Langganan Telepon	1.918.580,00	4.771.772,00	-59,79
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.000.000,00	2.994.000,00	0,20
Beban Sewa	49.000.000,00	31.500.000,00	55,56
Jumlah	1.430.035.642,00	1.756.472.298,00	-18,58

Secara keseluruhan beban barang dan jasa pada Semester II 2018 lebih rendah dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan karena berkurangnya beban pada belanja bahan berupa fotocopy, penggandaan, dokumentasi dan snack rapat, dan langganan telepon.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp180.415.008,00 dan Rp217.323.693,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31-Des-18	31-Des-17	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.869.500,00	80.922.500,00	-14,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.843.508,00	131.411.193,00	-15,65
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	152.000,00	1.590.000,00	-90,44
Beban Persediaan Suku Cadang	550.000,00	3.400.000,00	-83,82
Jumlah	180.415.008,00	217.323.693,00	-16,98

Rendahnya beban pemeliharaan pada tahun 2018 karena volume pemeliharaan gedung dan bangunan lebih sedikit berupa gorden kantor bertingkat, berupa perbaikan sekat ruangan. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa service rutin kendaraan, service AC dan peralatan computer dan laptop.

Pada tabel diatas dapat dilihat ada beban persediaan masuk dalam tabel pemeliharaan. Beban tersebut merupakan beban persediaan dan tercatat sebagai persediaan, karena jenis belanjanya bersifat untuk pemeliharaan seperti bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang maka dalam Neraca percobaan dan LO beban tersebut masuk dalam beban pemeliharaan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.026.479.473,00 dan Rp1.083.501.323,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	953.745.473,00	984.878.323,00	-3,16
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.350.000,00	7.750.000,00	-43,87
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.600.000,00	7.260.000,00	-9,09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.784.000,00	83.613.000,00	-26,11
Jumlah	1.026.479.473,00	1.083.501.323,00	-5,26

Pada awalnya beban perjalanan dinas dihitung sebesar 10 % dari total pagu setiap kegiatan, seiring adanya revisi anggaran dan kebutuhan perjalanan dinas maka jumlah beban perjalanan dinas naik menjadi 16,34% dari nilai dipa. Akan tetapi beban perjalanan dinas TA. 2018 masih lebih kecil sekitar 5,26 % dibanding tahun 2017.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp583.828.277,00 dan Rp557.814.940,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	174.546.708,00	143.046.484,00	22,02
Beban Penyusutan Jaringan	1.214.342,00	1.214.342,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	405.130.977,00	410.617.864,00	-1,34
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	1.528.750,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.407.500,00	1.407.500,00	0,00
Jumlah	583.828.277,00	557.814.940,00	4,66

Beban penyusutan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,66% disbanding tahun 2017, kenaikan beban penyusutan terdapat pada beban penyusutan gedung dan bangunan.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	9.500.000,00	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(321.350.000,00)	0,00	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	182.190.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	321.350.000,00	139.160.000,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(129.786.250,00)	(39.000,00)	0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(171.553.750,00)	0,00	0,00
Jumlah	-119.150.000,00	148.621.000,00	-180,17

Pendapatan penyesuaian nilai persediaan diakibatkan oleh perubahan nilai barang persediaan pada jenis barang yang sama pada saat pencatatan. Kerugian persediaan rusak/usang adalah bibit tanaman dari kegiatan pembibitan tanaman perkebunan yang dilakukan penilaian ulang atas penambahan biaya bahan dan pemeliharaan sehingga nilai perolehan awal atau sebelumnya dihapus terlebih dahulu kemudian diinput ulang berdasarkan perubahan nilai barunya.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.150.304.608,00 dan Rp7.444.142.535,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-5.892.791.032,00 dan Rp-5.125.374.444,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp398.800,00 dan Rp2.810.861.853,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp398.800,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	398.800,00
Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah	398.800,00

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2016. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.810.861.853,00.

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.663.125.105,00 dan Rp9.020.674.664,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.673.625.105,00
Diterima dari Entitas Lain	-10.500.000,00
Jumlah	5.663.125.105,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-10.500.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp5.673.525.105,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Tidak ada Transfer Masuk selama periode pelaporan 31 Desember 2018.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.921.037.481,00 dan Rp14.150.304.608,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 700/Kpts/KU.010/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 05/Kpts/KU.010/01/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tersebut dan atas Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baru, maka telah terjadi pergantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula ;

Kuasa Pengguna Anggaran : Asmarhansyah, SP, M.Sc, Ph.D

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Mizu Istianto, MP

2. Ada 7 (tujuh) kali Revisi DIPA TA. 2018 selama TA. 2018. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebutuhan kegiatan, refocusing dan untuk mengoptimalkan biaya setiap jenis belanja sehingga dapat mencapai out-put yang sesuai.
3. Untuk belanja pegawai terdapat perubahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) sebanyak 11 (sebelas) pegawai.
 - b. Pegawai pensiun 1 (satu) orang per 01 Mei 2018.
 - c. Pengangkatan Pertama dalam jabatan Fungsional 2 pegawai, dan Kenaikan Pangkat sebanyak 7 Pegawai.
 - d. Penambahan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) pegawai di Triwulan I 2018.
4. Persediaan bahan baku berupa pembibitan tanaman perkebunan sampai pada pelaporan keuangan Semester II tahun 2018 sudah didistribusikan dua jenis bibit, dan satu jenis lagi belum didistribusikan karena baru dilakukan penempelan okulasi pada bulan Desember 2018.
5. Terdapat Kesalahan Pencatatan Aset Tetap dengan nomor aset 4040104001 NUP. 2 (Pagar Permanen) senilai Rp39.880.000 sehingga terdapat aset yang ganda. Telah dilakukan koreksi pencatatan atas aset tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BPTP-Balitbangtan Kepri No. B-892/PL.230/H.12.32/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018.